

PEMERTAHANAN PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN DESA TENGANAN KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

I Nyoman Sender

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email: nyomansender@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the persistence of endogamous marriage in Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Tenganan Village, Manggis District, Karangasem Regency. Amid social change and the increasing acceptance of exogamous marriage in Balinese society, the people of Tenganan Pegringsingan consistently maintain village-based endogamous marriage as a core element of their Bali Aga cultural identity. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with traditional leaders, community figures, temple priests, and couples involved in endogamous marriages, as well as document analysis of awig-awig and customary records. The findings reveal that the persistence of endogamous marriage is driven by several key factors, including the preservation of tradition and cultural identity, adherence to customary law, the strengthening of village membership structures, and the protection of collective village resources. The process of endogamous marriage is carried out through pre-marital stages, customary rituals, and social-religious legitimization involving the wider village community. The implications of maintaining endogamous marriage include the reinforcement of social solidarity and collective identity, while also generating limitations on individual choice and potential internal kinship conflicts. This study concludes that endogamous marriage represents an adaptive cultural strategy for sustaining the continuity of traditional villages amid ongoing social change.

Keywords: *endogamous marriage, traditional village, Tenganan Pegringsingan, tradition, Bali Aga*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia karena tidak hanya menyangkut hubungan personal antara dua individu, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, religius, dan hukum yang lebih luas (Goode, 1982; Horton & Hunt, 1996). Dalam perspektif antropologi, perkawinan dipahami sebagai mekanisme sosial untuk mengatur relasi antarindividu, kesinambungan keturunan, serta pewarisan nilai dan norma budaya dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Namun, seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, institusi perkawinan mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi pola, makna, maupun praktik sosialnya. Mobilitas sosial, pendidikan, dan interaksi lintas budaya telah mendorong terjadinya pergeseran dari sistem perkawinan yang tertutup menuju sistem yang lebih terbuka (Giddens, 1991).

Perubahan tersebut juga berlangsung dalam masyarakat Bali, yang secara historis memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat dalam mengatur praktik perkawinan. Pada masa lalu, perkawinan di Bali sangat dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosial yang dikenal dengan catur wangsa, sehingga pemilihan pasangan hidup dibatasi oleh pertimbangan keturunan dan status sosial (Friederich, 1959). Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kebijakan hukum adat, praktik perkawinan di Bali mengalami transformasi yang cukup signifikan. Penghapusan sanksi adat seperti asupundung dan alangkahai karang hulu pada pertengahan abad ke-20 mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan

sosial modern (Dwipayana, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa adat di Bali tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus bernegosiasi dengan perubahan zaman.

Meskipun demikian, perubahan dalam praktik perkawinan tidak terjadi secara merata di seluruh komunitas adat di Bali. Di tengah kecenderungan masyarakat Bali yang semakin terbuka terhadap perkawinan eksogami, Desa Adat Tenganan Pegringsingan justru tetap mempertahankan sistem perkawinan endogami desa. Tenganan Pegringsingan, sebagai salah satu desa Bali Aga, dikenal memiliki sistem sosial-budaya yang relatif konservatif dan kuat dalam menjaga tradisi leluhur (Ardika, 2015). Dalam konteks ini, perkawinan endogami dipandang sebagai bentuk perkawinan yang ideal dan bermartabat, sementara perkawinan eksogami dianggap sebagai pelanggaran terhadap awig-awig desa dan dikenai sanksi adat tertentu (Yogantara & Mahayoga, 2014).

Pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan sosial, budaya, dan religius yang mendalam. Perkawinan endogami diyakini mampu menjaga kemurnian komunitas, memperkuat ikatan kekerabatan, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban krama desa tetap berada dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri (Sudarma et al., 2021). Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menambah jumlah krama inti desa dan menjaga keberlanjutan struktur sosial adat. Dalam perspektif antropologi, praktik endogami semacam ini merupakan salah satu bentuk strategi budaya untuk mempertahankan identitas kolektif suatu komunitas (Clayton, 1975; Morgan, 1994).

Di sisi lain, pemertahanan perkawinan endogami juga membawa implikasi sosial yang kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan endogami dapat memperkuat solidaritas sosial dan hubungan kekerabatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pilihan pasangan hidup serta meningkatkan risiko konflik keluarga apabila terjadi perceraian atau disharmoni rumah tangga (Hidayatulloh & Sabtiani, 2022). Dalam konteks masyarakat adat yang memiliki jaringan kekerabatan yang rapat, konflik dalam rumah tangga tidak jarang berdampak luas terhadap hubungan sosial antar keluarga dan komunitas (Rachman, 2016). Oleh karena itu, praktik perkawinan endogami perlu dipahami secara kritis dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya secara seimbang.

Kajian mengenai perkawinan endogami telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan, mulai dari perspektif hukum adat, agama, hingga kesehatan dan keharmonisan keluarga. Darussalam (2017), misalnya, menyoroti implikasi kesehatan dan pandangan agama terhadap perkawinan endogami, sementara Maksum (2021) menekankan peran keluarga dan faktor sosial dalam pemilihan pasangan endogami. Penelitian lain juga mengungkap bahwa perkawinan endogami sering dipertahankan sebagai sarana untuk menjaga kemurnian keturunan dan kekayaan keluarga (Azhari, 2013). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara utuh aspek alasan pemertahanan, proses pelaksanaan, dan implikasi sosial-budaya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Dalam konteks Desa Adat Tenganan Pegringsingan, penelitian mengenai perkawinan endogami memang telah dilakukan, terutama yang berfokus pada proses ritual dan kedudukan sosial krama desa (Yogantara & Mahayoga, 2014). Namun demikian, kajian yang menempatkan perkawinan endogami sebagai strategi budaya dalam mempertahankan identitas desa adat Bali Aga di tengah arus perubahan sosial modern masih relatif terbatas. Padahal, menurut Berger dan Luckmann (1966), praktik sosial yang terus direproduksi dan dilegitimasi secara kolektif merupakan hasil dari konstruksi sosial yang memiliki makna mendalam bagi pelaku budaya itu sendiri.

Pemertahanan perkawinan endogami di Tenganan Pegringsingan juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan awig-awig sebagai sistem norma adat yang mengatur kehidupan sosial dan religius masyarakat. Awig-awig berfungsi tidak hanya sebagai aturan hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi budaya yang memperkuat kepatuhan kolektif masyarakat

terhadap nilai-nilai leluhur (Koentjaraningrat, 1990). Dalam perspektif teori praktik sosial, tradisi dipertahankan melalui proses internalisasi nilai, habitus, dan praktik yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Bourdieu, 1977).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perkawinan endogami, tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam alasan-alasan pemertahannya, proses pelaksanaannya, serta implikasi sosial dan kultural yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian antropologi agama dan budaya Hindu, sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai dinamika pelestarian tradisi di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks (Sztompka, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, nilai, dan praktik sosial-budaya yang hidup dan dipahami oleh masyarakat adat setempat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan komunitas Bali Aga yang secara konsisten mempertahankan sistem perkawinan endogami desa. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yang meliputi prajuru adat, tokoh masyarakat, pemangku, serta pasangan yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan endogami. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, seperti awig-awig desa, arsip adat, serta hasil penelitian dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil penelitian untuk menangkap pola, tema, dan makna yang muncul dari data lapangan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dengan tetap menjaga objektivitas, etika penelitian, serta sensitivitas budaya selama proses pengumpulan dan analisis data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai alasan, proses, dan implikasi pemertahanan perkawinan endogami dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Praktik Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu praktik sosial-budaya yang hingga kini tetap dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Praktik ini mengharuskan warga desa untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan melarang perkawinan dengan pihak luar desa. Dalam struktur sosial masyarakat Tenganan, perkawinan endogami tidak sekadar dipahami sebagai pilihan pribadi, melainkan sebagai kewajiban adat yang mengikat seluruh krama desa. Oleh karena itu, perkawinan endogami memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan religius desa adat.

Secara sosial, perkawinan endogami dipandang sebagai bentuk perkawinan yang paling ideal dan bermartabat. Pasangan yang melangsungkan perkawinan endogami memperoleh pengakuan penuh sebagai krama desa inti, dengan hak dan kewajiban adat yang melekat di dalamnya. Status ini memberikan akses terhadap berbagai hak kolektif desa, seperti hak atas karang desa, keterlibatan dalam sangkepan adat, serta partisipasi penuh dalam upacara

keagamaan dan kegiatan sosial desa. Sebaliknya, mereka yang melanggar ketentuan perkawinan endogami dan memilih pasangan dari luar desa akan dikenai sanksi adat, baik berupa pengurangan hak adat maupun bentuk sanksi sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami berfungsi sebagai mekanisme seleksi sosial dalam mempertahankan struktur keanggotaan desa adat.

Dalam konteks budaya, perkawinan endogami merupakan bagian integral dari identitas Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai komunitas Bali Aga. Praktik ini diyakini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Tenganan memandang bahwa keberlangsungan desa adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik wilayah, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan tradisi, termasuk sistem perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan endogami menjadi simbol keberlanjutan budaya dan penanda identitas kolektif yang membedakan Tenganan Pegringsingan dari desa-desa adat Bali lainnya.

Selain itu, praktik perkawinan endogami juga memiliki dimensi religius yang kuat. Perkawinan dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama Hindu yang terintegrasi dengan adat istiadat desa. Setiap tahapan dalam perkawinan endogami mengandung makna simbolik dan religius yang berkaitan dengan penyucian diri, harmonisasi hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan. Keterlibatan prajuru adat dan pemangku dalam prosesi perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan endogami tidak hanya bersifat profan, tetapi juga sakral, karena menjadi bagian dari tatanan kosmis yang dijaga oleh desa adat.

Dengan demikian, praktik perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Perkawinan endogami berfungsi sebagai instrumen pemertahanan identitas adat, penguatan solidaritas sosial, serta mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan kehidupan desa. Gambaran umum ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami bukan sekadar tradisi yang diwariskan secara pasif, melainkan praktik sosial yang secara aktif direproduksi dan dimaknai oleh masyarakat sebagai bagian dari strategi budaya dalam mempertahankan keberlanjutan desa adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

3.3 Alasan-Alasan Pemertahanan Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi dan identitas budaya desa adat. Bagi masyarakat Tenganan, perkawinan endogami bukan sekadar praktik sosial, melainkan bagian dari sistem nilai yang diwariskan oleh leluhur dan harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kultural. Tradisi ini dipahami sebagai fondasi utama yang membedakan Tenganan Pegringsingan dari komunitas lain di Bali. Oleh karena itu, menjaga perkawinan endogami berarti menjaga eksistensi desa adat itu sendiri agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus perubahan sosial dan budaya.

Alasan lain yang sangat kuat adalah ketaatan terhadap awig-awig desa sebagai hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan. Awig-awig dipandang sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam tata kehidupan desa adat, sehingga kepatuhan terhadap aturan perkawinan endogami merupakan bentuk kepatuhan terhadap otoritas adat dan leluhur. Masyarakat Tenganan meyakini bahwa pelanggaran terhadap awig-awig tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan keharmonisan kehidupan desa. Dengan demikian, perkawinan endogami dijalankan bukan semata karena paksaan, melainkan karena internalisasi nilai adat yang telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Selain faktor tradisi dan ketaatan adat, pemertahanan perkawinan endogami juga dilandasi oleh kepentingan menjaga struktur sosial dan keanggotaan krama desa. Perkawinan endogami berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban adat tetap berada di dalam komunitas desa. Melalui sistem ini, keanggotaan krama inti desa dapat

dipertahankan secara berkelanjutan, sehingga struktur sosial adat tetap stabil. Pasangan yang menikah secara endogami memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur desa, termasuk hak atas karang desa, kewajiban ngayah, serta keterlibatan penuh dalam kegiatan adat dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial desa adat.

Alasan berikutnya berkaitan dengan upaya menjaga harta dan sumber daya desa agar tidak keluar dari komunitas adat. Dalam masyarakat Tenganan Pegringsingan, tanah, karang desa, dan berbagai aset adat dipandang sebagai milik kolektif yang harus dijaga bersama. Perkawinan endogami dianggap sebagai cara efektif untuk mencegah peralihan hak atas sumber daya tersebut kepada pihak luar desa. Dengan demikian, sistem perkawinan ini berperan penting dalam menjaga kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya desa adat. Aspek ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami tidak hanya memiliki dimensi budaya dan religius, tetapi juga dimensi ekonomi yang signifikan.

Di samping itu, pemertahanan perkawinan endogami juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan kohesi sosial internal. Perkawinan di dalam lingkungan desa memungkinkan terjalinnya hubungan kekerabatan yang erat antarwarga, sehingga memudahkan koordinasi sosial dan pelaksanaan kewajiban adat secara kolektif. Ikatan kekerabatan yang rapat dianggap mampu meminimalkan konflik sosial dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan desa. Dalam konteks ini, perkawinan endogami dipahami sebagai sarana untuk memperkokoh jaringan sosial yang menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas desa adat.

Dengan demikian, alasan-alasan pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bersifat multidimensional, mencakup aspek budaya, adat, sosial, ekonomi, dan religius. Pemertahanan ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan sebagai strategi budaya yang secara sadar dipilih oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan tradisi dan dinamika kehidupan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami di Tenganan Pegringsingan merupakan praktik sosial yang hidup, adaptif, dan memiliki makna strategis dalam mempertahankan eksistensi desa adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

3.4 Proses Pelaksanaan Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Proses pelaksanaan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berlangsung melalui tahapan-tahapan adat yang terstruktur dan sarat makna sosial serta religius. Perkawinan tidak dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai peristiwa komunal yang melibatkan keluarga, prajuru adat, pemangku, dan seluruh komunitas desa. Setiap tahapan dalam proses perkawinan endogami diatur secara ketat dalam awig-awig desa dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem adat yang mengikat kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan (Yogantara & Mahayoga, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa proses perkawinan merupakan bagian integral dari mekanisme reproduksi sosial dan budaya desa adat.

Tahap awal dalam proses perkawinan endogami dikenal melalui sistem matruna nyoman bagi pemuda dan daha bagi gadis. Tahapan ini berfungsi sebagai proses pendidikan sosial dan moral bagi generasi muda sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam tahap ini, para teruna dan daha dibina secara kolektif untuk memahami nilai-nilai adat, etika pergaulan, tanggung jawab sosial, serta kewajiban religius sebagai calon krama desa. Proses ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami tidak hanya berorientasi pada ikatan pasangan, tetapi juga pada pembentukan karakter individu agar selaras dengan norma dan nilai desa adat (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, tahap pra-perkawinan berfungsi sebagai mekanisme seleksi sosial sekaligus internalisasi nilai budaya.

Setelah melalui tahap matruna nyoman dan daha, proses perkawinan dilanjutkan dengan penentuan hari baik (dewasa ayu) dan rangkaian prosesi adat yang melibatkan keluarga kedua

mempelai serta prajuru adat. Tahapan ritual perkawinan umumnya meliputi tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir, yang masing-masing memiliki fungsi simbolik dan religius. Pada tahap inti, dilaksanakan upacara-upacara penyucian dan pengesahan perkawinan yang menegaskan status pasangan sebagai suami istri sekaligus sebagai krama desa yang sah. Ritual ini mencerminkan pandangan masyarakat Tenganan bahwa perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama Hindu yang terintegrasi dengan adat istiadat lokal (Sudiana, 2010).

Keterlibatan prajuru adat dan pemangku dalam setiap tahapan perkawinan endogami menunjukkan adanya relasi erat antara struktur kekuasaan adat dan praktik keagamaan. Prajuru adat berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses perkawinan berjalan sesuai dengan awig-awig, sementara pemangku berperan dalam memimpin ritual keagamaan dan menjaga kesakralan prosesi perkawinan. Peran aktor-aktor ini menegaskan bahwa perkawinan endogami bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga peristiwa religius yang memiliki implikasi kosmis bagi keseimbangan kehidupan desa (Geertz, 1973). Dengan demikian, legitimasi perkawinan tidak hanya bersumber dari kesepakatan keluarga, tetapi juga dari pengakuan adat dan agama.

Selain itu, proses pelaksanaan perkawinan endogami juga menegaskan fungsi kontrol sosial dalam masyarakat Tenganan Pegringsingan. Melalui pengawasan kolektif dan keterlibatan komunitas desa, setiap perkawinan dipastikan sesuai dengan norma adat yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan endogami akan berdampak pada status sosial pasangan dan keluarganya, baik dalam bentuk sanksi adat maupun pengurangan hak-hak sosial tertentu (Sudarma et al., 2021). Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses perkawinan endogami berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan desa.

Dalam perspektif teori praktik sosial, proses perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat dipahami sebagai praktik yang terus direproduksi melalui kebiasaan, ritual, dan kepatuhan kolektif masyarakat terhadap adat (Bourdieu, 1977). Proses ini tidak hanya mempertahankan struktur sosial yang ada, tetapi juga mereproduksi nilai-nilai budaya dan identitas kolektif desa adat. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan endogami bukanlah praktik yang bersifat statis, melainkan proses sosial yang hidup dan dinamis, yang secara terus-menerus dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari strategi budaya dalam menjaga keberlanjutan desa adat di tengah perubahan sosial.

3.5 Implikasi Pemertahanan Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan membawa implikasi sosial yang signifikan terhadap pola hubungan kekerabatan dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu implikasi utama adalah terbentuknya jaringan kekerabatan yang relatif terbatas namun sangat kuat secara internal. Hubungan antarwarga desa menjadi lebih erat karena didasarkan pada ikatan darah dan perkawinan yang berulang dalam lingkup komunitas yang sama. Kondisi ini memperkuat solidaritas sosial dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kewajiban adat seperti ngayah, sangkepan, dan upacara keagamaan (Koentjaraningrat, 2009). Namun demikian, keterbatasan jaringan kekerabatan eksternal juga berpotensi mengurangi intensitas interaksi sosial dengan masyarakat di luar desa adat.

Selain memperkuat solidaritas internal, perkawinan endogami juga berimplikasi pada stabilitas sosial desa. Ikatan kekerabatan yang rapat memungkinkan masyarakat untuk membangun mekanisme kontrol sosial yang efektif. Setiap individu tidak hanya bertanggung jawab kepada pasangan dan keluarga inti, tetapi juga kepada keluarga besar dan komunitas desa. Dalam konteks ini, norma adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan bersama (Berger & Luckmann, 1966). Namun, ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat merembet ke hubungan antar keluarga besar, mengingat eratnya ikatan kekerabatan dalam komunitas endogami (Hidayatulloh & Saptiani, 2022).

Dari sisi budaya, pemertahanan perkawinan endogami berimplikasi pada penguatan identitas kolektif masyarakat Tenganan Pegringsingan sebagai komunitas Bali Aga. Praktik ini menjadi simbol kontinuitas tradisi dan penanda keunikan budaya desa adat di tengah homogenisasi budaya yang dipicu oleh modernisasi dan globalisasi (Ardika, 2015). Perkawinan endogami berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai-nilai adat dan budaya, karena melalui institusi keluarga nilai-nilai tersebut ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, keluarga hasil perkawinan endogami menjadi ruang utama internalisasi norma, etika, dan tradisi desa adat.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan dimensi ekonomi dan pengelolaan sumber daya desa. Dengan mempertahankan perkawinan endogami, masyarakat Tenganan Pegringsingan dapat memastikan bahwa hak atas karang desa, tanah adat, dan sumber daya kolektif lainnya tetap berada dalam lingkup komunitas. Hal ini berkontribusi pada kemandirian ekonomi desa adat dan mencegah terjadinya alih kepemilikan sumber daya kepada pihak luar desa (Sudarma et al., 2021). Dalam konteks ini, perkawinan endogami tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai strategi ekonomi kolektif untuk menjaga keberlanjutan desa adat.

Namun demikian, pemertahanan perkawinan endogami juga mengandung implikasi yang bersifat dilematis, terutama terkait dengan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Sistem endogami secara struktural membatasi ruang pilihan individu, karena calon pasangan harus berasal dari komunitas desa yang sama. Dalam perspektif sosiologi modern, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan kolektif komunitas (Giddens, 1991). Meskipun masyarakat Tenganan Pegringsingan secara umum menerima pembatasan ini sebagai bagian dari komitmen adat, potensi ketegangan antara nilai tradisi dan aspirasi individu tetap menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.

Dalam kerangka teori praktik sosial, implikasi pemertahanan perkawinan endogami menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya bertahan karena diwariskan, tetapi karena terus direproduksi dan dimaknai dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat (Bourdieu, 1977). Praktik perkawinan endogami di Tenganan Pegringsingan mencerminkan kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan keseimbangan antara stabilitas sosial dan dinamika perubahan. Dengan demikian, implikasi perkawinan endogami tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dampak positif atau negatif, melainkan sebagai konsekuensi dari pilihan budaya kolektif yang memiliki makna strategis dalam menjaga keberlanjutan identitas, harmoni sosial, dan kemandirian Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

3.5 Refleksi Teoretis atas Temuan Penelitian

Temuan penelitian mengenai pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelanjutan tradisi masa lalu, melainkan sebagai praktik sosial yang secara sadar direproduksi dan dilegitimasi oleh masyarakat adat. Dalam perspektif teori praktik sosial, pemertahanan perkawinan endogami merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai adat yang membentuk habitus masyarakat Tenganan Pegringsingan, sehingga praktik ini dijalankan secara konsisten tanpa selalu dipersepsikan sebagai bentuk paksaan (Bourdieu, 1977). Habitus tersebut tercermin dalam kepatuhan kolektif terhadap awig-awig, penerimaan terhadap sanksi adat, serta pemaknaan perkawinan sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap leluhur dan komunitas desa.

Dari sudut pandang teori konstruksi sosial, perkawinan endogami di Tenganan Pegringsingan dapat dipahami sebagai realitas sosial yang dikonstruksi, dilembagakan, dan diwariskan melalui proses sosialisasi antar generasi (Berger & Luckmann, 1966). Melalui tahapan matruna nyoman dan daha, ritual perkawinan, serta keterlibatan prajuru adat dan pemangku, nilai-nilai endogami dilegitimasi sebagai kebenaran sosial yang bersifat objektif dalam kehidupan masyarakat desa. Proses ini menjadikan perkawinan endogami bukan sekadar norma, tetapi realitas sosial yang dianggap wajar, ideal, dan bermartabat oleh masyarakat setempat.

Refleksi teoretis juga menunjukkan bahwa pemertahanan perkawinan endogami berkaitan erat dengan teori sistem religi, di mana praktik sosial tidak dapat dilepaskan dari dimensi sakral dan kosmologis (Geertz, 1973). Dalam konteks Tenganan Pegringsingan, perkawinan dipahami sebagai bagian dari tatanan kosmis yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan kekuatan ilahi. Kepatuhan terhadap awig-awig dan pelaksanaan ritual perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara dunia sekala dan niskala. Dengan demikian, pemertahanan perkawinan endogami tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai praktik religius yang diyakini menjaga keharmonisan kehidupan desa.

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat direfleksikan melalui teori pilihan rasional dalam batas-batas tertentu. Meskipun sistem endogami membatasi kebebasan individu, masyarakat Tenganan Pegringsingan tetap memandang praktik ini sebagai pilihan kolektif yang rasional karena memberikan keuntungan sosial, budaya, dan ekonomi bagi komunitas desa (Coleman, 1990). Keuntungan tersebut antara lain berupa stabilitas sosial, kepastian status keanggotaan krama desa, serta perlindungan terhadap sumber daya kolektif desa adat. Dengan demikian, rasionalitas yang bekerja dalam pemertahanan perkawinan endogami bukanlah rasionalitas individual semata, melainkan rasionalitas kolektif yang berorientasi pada keberlanjutan komunitas.

Dalam konteks perubahan sosial, refleksi teoretis ini menunjukkan bahwa pemertahanan perkawinan endogami di Tenganan Pegringsingan bukanlah bentuk resistensi total terhadap modernitas, melainkan strategi budaya yang selektif dan adaptif. Masyarakat desa adat mampu membedakan aspek-aspek kehidupan yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan aspek-aspek yang harus dipertahankan sebagai inti identitas budaya (Sztompka, 2007). Perkawinan endogami ditempatkan sebagai elemen fundamental yang tidak mudah dinegosiasikan karena berkaitan langsung dengan eksistensi dan keberlanjutan desa adat.

Dengan demikian, refleksi teoretis atas temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan praktik sosial yang kompleks dan multidimensional. Praktik ini merepresentasikan pertemuan antara habitus budaya, konstruksi sosial, sistem religi, dan rasionalitas kolektif masyarakat adat. Refleksi ini sekaligus memperkuat posisi penelitian ini dalam khazanah kajian antropologi agama dan budaya Hindu, khususnya dalam memahami bagaimana tradisi lokal mampu bertahan dan bermakna di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemertahanan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bukan sekadar kelanjutan tradisi leluhur, melainkan praktik sosial yang secara sadar direproduksi dan dimaknai oleh masyarakat adat sebagai strategi budaya untuk menjaga keberlanjutan identitas, struktur sosial, dan tatanan religius desa. Perkawinan endogami diposisikan sebagai institusi fundamental yang menghubungkan dimensi sosial, budaya, dan sakral, sehingga keberadaannya menjadi penopang utama stabilitas dan kohesi sosial komunitas desa adat.

Hasil penelitian mengungkap bahwa alasan pemertahanan perkawinan endogami bersifat multidimensional, mencakup pelestarian tradisi dan identitas budaya Bali Aga, ketiaatan terhadap awig-awig sebagai hukum adat, penguatan struktur keanggotaan krama desa, serta perlindungan terhadap sumber daya kolektif desa adat. Proses pelaksanaan perkawinan endogami, yang diawali melalui tahapan matruna nyoman dan daha hingga rangkaian ritual perkawinan, berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai, seleksi sosial, dan legitimasi adat-religius terhadap pasangan yang memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, perkawinan endogami tidak hanya membentuk keluarga baru, tetapi juga mereproduksi nilai dan tatanan sosial desa adat secara berkelanjutan.

Implikasi pemertahanan perkawinan endogami menunjukkan adanya penguatan solidaritas sosial dan identitas kolektif masyarakat Tenganan Pegringsingan, sekaligus menghadirkan

keterbatasan dalam ruang pilihan individu dan potensi konflik kekerabatan yang bersifat internal. Temuan ini menegaskan bahwa praktik endogami mengandung konsekuensi sosial yang bersifat ambivalen, namun tetap diterima secara kolektif sebagai bagian dari komitmen adat dan rasionalitas budaya masyarakat desa.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa pemertahanan tradisi dapat dipahami sebagai praktik sosial yang adaptif dan reflektif, bukan sebagai bentuk resistensi pasif terhadap perubahan sosial. Integrasi teori praktik sosial, konstruksi sosial, sistem religi, dan pilihan rasional menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai yang dianggap esensial bagi keberlanjutan komunitasnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian antropologi agama dan budaya Hindu, khususnya dalam memahami dinamika pemeliharaan tradisi lokal di tengah perubahan sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. W. (2015). *Bali Aga dan identitas budaya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Azhari. (2013). Perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 34(2), 145–160.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cahyono, A. (2002). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Clayton, R. (1975). *Kinship and marriage*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Darussalam. (2017). Pernikahan endogami dalam perspektif agama Islam dan ilmu pengetahuan. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1), 67–82.
- Dwipayana, A. A. G. (2001). *Perubahan sosial dan budaya Bali*. Denpasar: Bali Post Press.
- Friederich, R. (1959). *The civilization and culture of Bali*. The Hague: W. van Hoeve.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Cambridge: Polity Press.
- Goode, W. J. (1982). *The family*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hidayatulloh, M., & Sabtiani, D. (2022). Pernikahan endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 89–104.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1996). *Sociology* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maksum. (2021). Perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 13(2), 201–215.
- Morgan, L. H. (1994). *Ancient society*. Tucson: University of Arizona Press. (Karya asli diterbitkan 1877)
- Rachman. (2016). Perkawinan endogami perspektif hukum adat dan hukum Islam (Studi pada masyarakat Bugis Bone). *Jurnal Al-Qadha*, 3(2), 121–138.
- Sudiana, I. G. N. (2010). *Agama Hindu dan sistem sosial Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sudarma, I. M., dkk. (2021). *Hukum adat dan praktik perkawinan di Bali*. Denpasar: Penerbit Paramita.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yogantara, I. M. A., & Mahayoga, I. M. S. (2014). Perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringging, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kajian Bali*, 4(2), 135–154.